

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik. Dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerja sama daripada menentangnya, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. (Raharjo, 2007)

Menurut Renyowijoyo (2010:14), *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang *Steward* kepada pemberi tanggung jawab. Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang selaras antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi utilitas akan maksimal. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. (Raharjo, 2007)

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini, dapat menjelaskan eksistensi Pemerintah Daerah sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk bertindak sesuai dengan kepentingan publik dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *stewards* (manajemen dan auditor internal) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifkan pengendalian intern untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

2. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. (Halim, 2007:87)

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Terwujudnya akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*Horizontal Accountability*) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, bukan hanya sekedar pertanggungjawaban vertikal (*Vertical Accountability*) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2002:21)

Menurut Halim dan Iqbal (2012:20), Dalam suatu struktur pemerintah, akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan keterangan. Lanjut menurut Halim dan Iqbal (2012:24) pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi :

1. Perencanaan, proses dasar untuk menentukan tujuan dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai
2. Pelaksanaan, adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan

terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

3. Pelaporan, Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.
4. Pertanggungjawaban, adalah suatu tindakan atau perbuatan untuk menanggung segala sesuatu yang terjadi akibat suatu aktivitas tertentu
5. Pengawasan, yaitu salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Terdapat empat dimensi akuntabilitas publik menurut Renyowijoyo (2010:15), yaitu:

a) Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Akuntabilitas kejujuran adalah tindakan yang dilakukan sesuai dengan pertanggungjawaban dan tidak menyalahgunakan jabatan atau wewenang untuk kepentingan pribadi, sedangkan dalam akuntabilitas hukum adalah jaminan terhadap patuh terhadap hukum dalam penggunaan dana publik.

b) Akuntabilitas Proses

Melihat proses dalam pelaksanaan tugas apakah sudah sesuai dengan prosedur, baik itu sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas

proses dititikberatkan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat apakah sudah responsive atau belum.

c) Akuntabilitas Program

Menganalisa apakah program yang akan diberikan sudah sesuai tujuan atau tidak, dan apakah tujuan tersebut akan tercapai dengan program tersebut. Akuntabilitas program juga menyiapkan program pengganti yang lebih minim dana apabila program utama tidak berjalan atau berhenti ditengah jalan.

d) Akuntabilitas Kebijakan

Terkait peraturan terkait APBD/N yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, DPRD maupun OPD itu sendiri dalam merencanakan, menjalankan dan mengevaluasi APBD/N.

Sedangkan menurut Halim (2007:87) akuntabilitas yang efektif mempunyai beberapa ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas harus utuh dan menyeluruh (dalam arti tanggung jawab terhadap pokok dan fungsi instansi, serta program pembangunan yang dipercayakan BUMN/BUMD yang berada dibawah wewenangnya.
- b. Mencakup aspek yang menyeluruh mengenai aspek integritas keuangan, ekonomis, efisien, dan sesuai prosedur
- c. Akuntabilitas harus dibangun berdasarkan sistem informasi yang handal, untuk menjamin keabsahan, objektivitas dan ketepatan waktu penyampaian informasi.

- d. Adanya penilaian efektif dan independen terhadap akuntabilitas suatu instansi.
- e. Adanya tindak lanjut terhadap laporan penilaian atas akuntabilitas.

3. Transparansi Laporan Keuangan

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang di capai. Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya, manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi (Loina, 2003: 14).

Transparansi laporan keuangan daerah berarti keterbukaan dalam memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (Noordiawan: 2010:42).

Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitasnya

yang relevan. Transparansi harus seimbang juga, dengan kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Peran media juga sangat penting bagi transparansi pemerintah, baik sebagai sebuah kesempatan untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga sebagai “watchdog” atas berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari para aparat birokrasi. Jelas, media tidak akan dapat melakukan tugas ini tanpa adanya kebebasan pers, bebas dari intervensi pemerintah maupun pengaruh kepentingan bisnis (Loina,2003:15).

Adapun indikator dalam mengukur transparansi menurut Loina (2003:16) adalah sebagai berikut:

1. Keterbukaan dan Kepatuhan Pemerintah, yaitu ada tidaknya penyediaan informasi yang jelas kepada publik dan kepatuhan akan standarisasi dari semua proses-proses pelayanan publik
2. Publikasi laporan keuangan daerah, dimana pemerintah mempublikasikan laporan keuangan daerahnya melalui *website* pemerintah daerah masing-masing maupun media cetak/elektronik.
3. Ketersediaan Informasi Kinerja, yaitu ketersediaan informasi mengenai kinerja pemerintah daerah.

4. Penyajian Laporan Keuangan

Menurut Mardiasmo (2002:159) Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan .

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurangkurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas dana.

Tujuan laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- a. Akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. Manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode

pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Renyowijoyo (2010:135) karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, adapun karakteristik kualitas laporan keuangan tersebut yaitu:

1. Relevan

Laporan keuangan yang relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam mengevaluasi masa lalu dan memprediksi masa depan, seperti:

- a. Manfaat umpan balik (*feedback value*).
- b. Manfaat prediktif (*predictive value*).
- c. Tepat waktu (*timeliness*).
- d. Lengkap.

2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.

Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut :

- a. Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

- b. Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c. Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan, yaitu informasi akuntansi harus dapat diperbandingkan dengan informasi akuntansi periode sebelumnya pada perusahaan yang sama, atau dengan perusahaan sejenis lainnya pada periode waktu yang sama
 4. Dapat dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Anthony dalam Mardiasmo (2002:168) mengklasifikasikan pemakai laporan sektor publik menjadi lima kelompok, yaitu: (1) Lembaga pemerintah (*Governing bodies*), (2) Investor dan kreditor, (3) Pemberi sumber daya (*resource providers*), (4) Badan pengawas (*oversight bodies*), dan (5) Konstituen.

5. Aksesibilitas Laporan Keuangan

Aksesibilitas menurut perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau

kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar (Rohman, 2009 dalam Sumiyati, 2015). Aksesibilitas dalam laporan keuangan adalah sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006 dalam Sumiyati, 2015).

Dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pasal 103, dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Yang berarti pula bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada pihak pengguna secara luas atas laporan keuangannya melalui internet, surat kabar atau media lain.

Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu: hak untuk mengetahui, hak untuk diberi informasi dan hak untuk di dengar aspirasinya. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti

pertanggungjawaban (*Accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*) (Mardiasmo, 2002: 171).

Agar informasi yang disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip akuntabilitas, pemerintah daerah harus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya, tidak sekedar menyampaikan ke DPRD, tetapi juga memfasilitasi masyarakat luas agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Dengan demikian untuk tercapainya aksesibilitas laporan keuangan, pemerintah daerah harus memenuhi syarat antara lain (Sumiyati, 2015) :

1. Keterbukaan, yaitu laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah dipublikasikan secara terbuka melalui media massa
2. Kemudahan, yaitu pemerintah daerah harus memberikan kemudahan kepada *stakeholder* dalam memperoleh informasi keuangan daerah
3. *Accessible* (dapat diakses) yaitu masyarakat dapat mengakses laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet.

Masalah yang kemudian timbul adalah publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah (melalui surat kabar, internet, atau dengan cara lain) nampaknya belum menjadi hal yang umum. Ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja disebabkan karena laporan tahunan yang tidak

memuat semua informasi yang relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jadi semakin baik laporan keuangan daerah maknanya berimplikasi semakin meningkatkan laporan keuangan daerah (Wahyuni,2014)

B. Hasil Penelitian Relevan

Tabel II.1. Tabel Penelitian yang Relevan

No	Judul, Jurnal, Pengarang	Hipotesis	Metodologi	Hasil Penelitian
1.	Judul: Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten Badung) Jurnal: e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Akuntansi program S1 Vol. 2, No. 1, Tahun 2014 ISSN 2528-1399 Pengarang: Putu Sri Wahyuni, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Nyoman Trisna	H1: Pengaruh Penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah H2: Pengaruh Aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Populasi: OPD Pemerintahan Kabupaten Badung (Kepala OPD dan Sub. Bagian Keuangan OPD) Sampel: menggunakan purposive sampling dengan mengambil sampel sebanyak 35 OPD yang terdiri dari 15 Dinas, 6 Badan, 1 Inspektorat, 2 Sekretariat, 1 RSUD, 4 Kantor, 6 Kecamatan.	Hasil pengujian menunjukkan bahwa Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

2.	Judul: Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon Jurnal: ISSN 2302-9791, Vol.2, No. 1, May 2015 Pengarang: Salomi J. Hehanussa	H1: Pengaruh Penyajian Laporan keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Ha2: Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daaerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Populasi: Pengguna eksternal laporan keuangan (pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan) Pemerintah Kota Ambon Sampel: Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Dengan kriteria: 1. Pegawai pemkot Ambon sebagai pengguna laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai pemkot yang dijadikan responden adalah mereka yang telah bekerja lebih dari 2 tahun. 2. Akademi dan mahasiswa selaku <i>stakeholder</i> pemerintah merupakan pengguna potensial laporan keuangan pemkot ambon yang	Hasil pengujian menunjukkan bahwa Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
----	---	--	---	--

			mempunyai rentang variabilitas pemahaman dan kepedulian akan laporan keuangan yang cukup tinggi. Mahasiswa yang dijadikan responden adalah mereka yang minimal berada di semester empat.	
3.	Judul: Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara Jurnal: Jurnal Akuntansi & Auditing, Volume 8/No. 2/ Mei 2012: 97-189 ISSN 1410-2420 Pengarang: Siti Aliyah dan Aida Nahar	H1: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. H2: Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah H3: Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh	Populasi: Pengguna laporan keuangan (pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan) pemerintah Kabupaten Jepara, yang dalam hal ini populasi yang dituju adalah anggota DPRD dan LSM di wilayah Kabupaten Jepara. Sampel: Teknik <i>proposionate stratified random sampling</i>. Dengan besarnya sample sebanyak 94 orang.	1. Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2. Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 3. Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

		positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.		
4.	Judul: Pengaruh Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Studi Persepsi Pengguna Eksternal Laporan Keuangan Kota Banjarmasin) Jurnal: JSAI: Vol.2 No.1 Juni 2015 ISSN 2407-4446 Pengarang: Ika Arifanny, Fahmi Rizani, Rifqi Novriyandana	H1: Kualitas Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah H2: Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Populasi: Anggota DPRD Kota Banjarmasin yang terpilih, BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, dan Akuntan Pendidik (Akademisi) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Sampel: menggunakan <i>Convenience Sampling</i> dengan sampel Anggota DPRD Kota Banjarmasin yang terpilih, BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, dan Akuntan Pendidik (Akademisi) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat	1. Hasil pengujian statistik untuk menjawab hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel kualitas penyajian laporan keuangan kota Banjarmasin berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin 2. Hasil pengujian statistik untuk menjawab hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan kota Banjarmasin berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Banjarmasin

5.	Judul: Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada OPD Kabupaten Bengkalis) Jurnal: JOM FEKON Vol.3 No.1 (Februari) 2016 ISSN 2355-6854 Pengarang: Nurlaili	H1: Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah H2: Aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Populasi: Satuan Kerja Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Bengkalis dengan jumlah 36 OPD. Sampel: menggunakan <i>Total Sampling</i> dengan sampel kepada OPD dan sub. Bagian keuangan yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Bengkalis	1. Hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. semakin baik penyajian laporan keuangan daerah tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan secara lengkap dan jujur maka laporan keuangan akan transparansi dan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 2. Hasil pengujian hipotesis kedua menemukan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
6.	Judul: Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Daerah,	H1: Penerapan sistem keuangan daerah berpengaruh terhadap	Populasi: OPD Kabupaten Inhil dengan responden Kepala OPD dan	(1) Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas

	Transparansi, Aktivitas Pengendalian dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Jurnal: JOM FEKON, Vol.3 No.1 (Februari) 2016 ISSN 2355-6854 Pengarang: Dewi Yuli Angraini	akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah H2: Transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah H3: Aktivitas pengendalian berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah H4: Penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Kepala Sub. Bagian keuangan OPD. Sampel: Terdiri dari 60 orang, yaitu 30 OPD yang terdiri dari sekretariat DPRD, 16 dinas, 1 Inspektorat, 8 Badan, 4 Kantor. Dengan teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuisioner	pengelolaan keuangan daerah. (2) Transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (3) Aktivitas pengendalian berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (4) Penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
7.	Judul: Pengaruh Pengendalian Internal, <i>Value For Money</i>, Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan	H1: Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah H2: <i>Value for money</i> berpengaruh positif	Populasi: 12 Dinas yang ada di Kabupaten Klungkung. Sampel: Menggunakan metode <i>purposive sampling</i> dengan jumlah penelitian 81 orang.	1. Secara parsial dapat diketahui bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah 2. Secara parsial dapat diketahui bahwa <i>value for money</i>,

	Kuangan (Studi Empiris Pada OPD di Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung) Jurnal: e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume: 2 No.1 Tahun 2014) ISSN 2528-1399 Pengarang: Putu Riana Primayani, Nyoman Triana Herawati, dan Nyoman Ari Surya Darmawan	terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. H3: Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah H4: Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. H5: Pengendalian internal, <i>value for money</i> , penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah		berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di OPD Kabupaten Klungkung. 3. Secara parsial dapat diketahui bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 4. Secara parsial dapat diketahui bahwa aksesibilitas laporan keuangan, berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. 5. Secara simultan dapat diketahui bahwa pengendalian internal, <i>value for money</i>, penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah di OPD Kabupaten Klungkung
--	--	---	--	---

8.	Judul: Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Jurnal: JOM FEKON Vol.2 No.2 Oktober 2015. ISSN 2355-6854 Pengarang: Sumiyati	H1: Penyajian Laporan Keuangan Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. H2: Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.	Populasi: Pejabat setingkat eselon II, dan III yang terdiri dari Kepala OPD, Kepala Bagian Keuangan OPD, Bendahara pengeluaran/ penerimaan OPD pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Sampel: Kepala OPD, Kepala Bagian Keuangan, Staf Bagian Keuangan dan Bendahara Pengeluaran/Penerimaan OPD. Maka jumlah responden pada penelitian ini adalah 120 orang, yaitu 30 OPD Kabupaten Rokan Hilir dikalikan 4 orang yang menjadi responden di setiap OPD.	1. Hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. 2. Hasil pengujian hipotesis kedua menemukan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jadi memberikan kemudahan akses kepada para pengguna laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan terwujudnya kepercayaan publik kepada pemerintah daerah
----	--	--	---	--

Berdasarkan tabel penelitian-penelitian yang relevan, hal yang paling menonjol adalah mengenai studi empiris yang dilakukan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (OPD) Kota/Kabupaten.

Oleh karena itu, peneliti mengacu kepada hasil penelitian yang relevan untuk menguatkan penelitian ini. Dengan demikian, peneliti tertarik memilih variabel transparansi laporan keuangan daerah, penyajian laporan keuangan daerah, dan aksesibilitas laporan keuangan daerah. Dalam konteks penelitian ini hal yang menjadi pembeda adalah mengenai objek atau tempat yang diteliti yaitu pada OPD Pemerintah Daerah Kota Depok.

C. Kerangka Teoritik

Tiga misi utama otonomi daerah adalah menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan (Mardiasmo, 2002:25)

Suatu laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat disajikan secara relevan. Hal ini sesuai menurut PP No. 71 Tahun 2010 terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Selain itu, berdasarkan PP Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang akuntanbel dan transparan, pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban

berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pada dasarnya, akuntabilitas adalah pemberian informasi dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi, dan hak untuk di dengar aspirasinya. Sedangkan menurut Halim (2007:87), Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Terwujudnya akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (*Horizontal Accountability*) yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, bukan hanya sekedar pertanggungjawaban vertikal (*Vertical Accountability*) yaitu pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik (Mardiasmo, 2002:21).

Menurut Peraturan Pemerintah No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sedangkan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban

daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Keuangan daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Jangan sampai ada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan kekuasaannya untuk mempergunakan keuangan daerah untuk hal yang tidak semestinya.

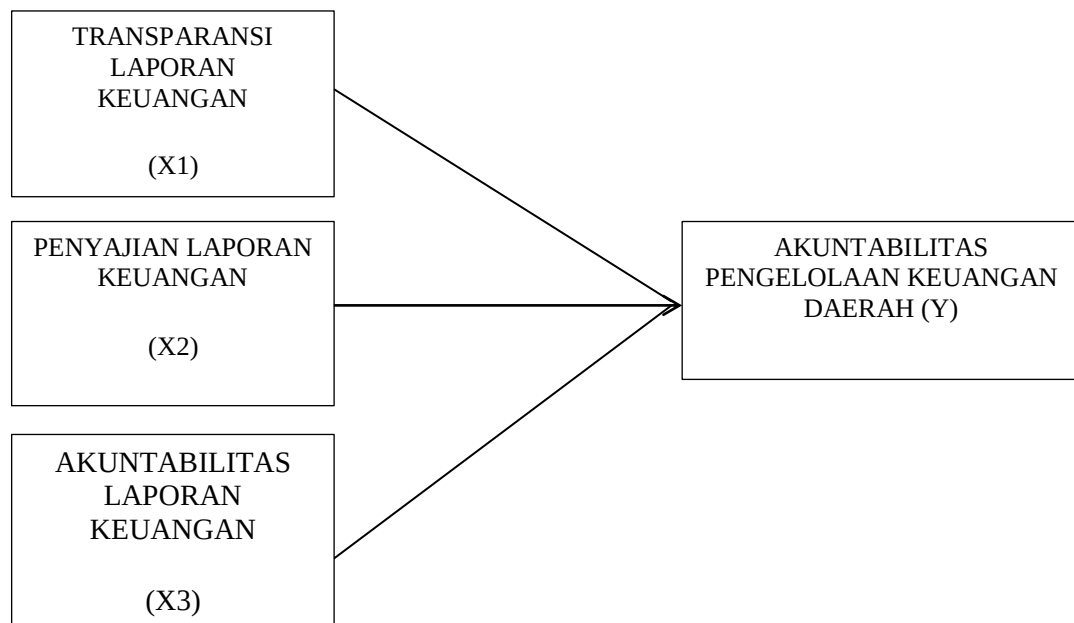
Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang di capai. Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya, manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi (Loina, 2003: 14).

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya

adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002:159). Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili (2016), penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, semakin baik penyajian laporan keuangan daerah tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan secara lengkap dan jujur maka laporan keuangan akan transparansi dan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu: hak untuk mengetahui, hak untuk diberi informasi dan hak untuk di dengar aspirasinya. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban (*Accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*) (Mardiasmo, 2002: 171). Menurut Sumiyati (2015) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan penyebab dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena kemudahan aksesibilitas menjadikan akuntabilitas terhadap laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan uraian kerangka teoritis dapat digambarkan dengan kerangka pemikiran, yaitu:



Gambar II.1

Kerangka Pemikiran Penelitian

Sumber : Data diolah peneliti, 2017

D. Perumusan Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang di capai. Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Keduanya akan sangat sulit dilakukan jika

pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya, manajemen kinerja yang baik adalah titik awal dari transparansi (Loina, 2003: 14).

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung-jawaban pemerintah dalam pengelo-laan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2016) dimana transparansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya jika transparansi laporan keuangan ditingkatkan maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan meningkat

H1: Transparansi laporan Keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah .

2. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Mardiasmo (2002:159) Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor

publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan .

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili (2016), penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, semakin baik penyajian laporan keuangan daerah tentu akan semakin memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan secara lengkap dan jujur maka laporan keuangan akan transparansi dan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini selaras dengan penelitian Sumiyati (2015) yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2016) menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, apabila penyajian laporan keuangan dinaikan 1% sedangkan variabel yang lainnya tetap maka akan menyebabkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah naik sebesar 0.265%.

H2: Penyajian laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah, yaitu: hak untuk mengetahui, hak untuk diberi informasi dan hak untuk di dengar aspirasinya. Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban (*Accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*) (Mardiasmo, 2002: 171).

Menurut Sumiyati (2015) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan penyebab dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena kemudahan aksesibilitas menjadikan akuntabilitas terhadap laporan keuangan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili (2016) menyatakan bahwa aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya dengan terciptanya aksesibilitas laporan keuangan berdampak baik terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan menurut Lily (2015), aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

H3: Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.